

## **ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Liandy Frisky Kewas<sup>1</sup>, Yance Tawas<sup>2</sup>, Frida Magda Sumual<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email : [liandykewas@gmail.com](mailto:liandykewas@gmail.com)<sup>1</sup>, [yancetawas@unima.ac.id](mailto:yancetawas@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [fridasumual@unima.ac.id](mailto:fridasumual@unima.ac.id)<sup>3</sup>

Diterima : 14 Juli 2022, Disetujui 8 Agustus 2022

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja dalam pada badan keuangan dan asset daerah Kota Bitung. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung merupakan analisis atas hasil kerja dari belanja daerah Pemerintahan Kota Bitung dalam LRA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif dengan menganalisis varians, pertumbuhan, keserasian dan efisiensi belanja untuk mengetahui kinerja belanja pada BKAD Kota bitung. Hasil penelitian ini yaitu belanja pada LRA menunjukkan bahwa kinerja belanja PemKot Bitung dinilai cukup baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja terlihat pada tahun 2016-2019. Sehingga diharapkan tahun selanjutnya PemKot Bitung sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta pimpinan BKAD sebaiknya meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efisiensi belanja di masa yang akan datang.

**Kata Kunci** : *analisis kinerja; belanja;laporan realisasi anggaran.*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the performance of internal spending on financial institutions and regional assets of Bitung City. Expenditure Performance Analysis in the Budget Realization Report (LRA) at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Bitung City is an analysis of the work results of the Bitung City Government's regional expenditure in the LRA. The method used in this research is descriptive analysis by analyzing the variance, growth, compatibility and efficiency of spending to determine the performance of spending at BKAD Bitung City. The results of this study, namely spending on the LRA for the 2016-2019 FY shows that the spending performance of the Bitung City Government was considered quite good and continues to make improvements every year in the utilization of expenditure realization. Expenditure growth was seen in FY 2016 – 2019. So it was hoped that next year the Bitung City Government should allocate regional expenditures in a balanced portion according to the needs of regional development and community welfare and the BKAD leadership should further review the benefits and allocation of regional expenditures so as to improve spending efficiency in the future. which will come.*

**Keywords:** *performance; analysis expenditure; budget realization report.*

**Pendahuluan**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang punya kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atau bangsa dan negara. Organisasi pemerintah dibentuk untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum dan sebagai organisasi nirlaba yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk memberikan pelayanan dan peningkatan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang (Apriyanti *et al.*, 2019).

Terjaminnya rasa aman dan nyaman, mutu pendidikan dan juga kesehatan tujuan dalam bentuk kualitatif yang biasanya akan dicapai pemerintah. Sehingga terwujudnya transparansi anggaran merupakan salah satu upaya pemerintah dengan mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu (Liando *et al.*, 2016). Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang terdiri dari a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Anggaran adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam sebuah organisasi. Anggaran oprasional biasanya mencakup periode satu tahun dan menunjukkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk tahun itu. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual yang dicapai (Wiranda, 2021).

Penilaian kinerja dari pemerintah berbeda dengan penilaian yang ada di perusahaan lain atau perusahaan yang kegiatannya mencari laba, sehingga penilaian kinerja dan keefektivitas juga efisiensi dalam penganggaran yang dilaksanakan pemerintah tidak bisa langsung dikatakan secara bentuk baik atau tidak karena perlu adanya analisis yang berbeda dengan yang dilakukan perusahaan swasta (Naully, 2019).

Dalam menilai program atau kegiatan yang direncanakan dibutuhkan pengukuran kinerja agar dapat dilihat apakah telah mencapai sesuai dengan yang direncanakan atau tidak (Fajriyah, 2018). Untuk mengukur kinerja dapat dimulai dari penetapan indikator kinerja, dari indikator kinerja dapat memberikan informasi yang akan digunakan oleh instansi atau pemerintah untuk memantau atau mengevaluasi kinerja sehingga masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah dalam hal penganggaran (Sartika, 2018). Juga memiliki manfaat untuk memperbaiki kinerja agar dapat tetap fokus pada visi-misi organisasi..

(Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama satu periode pelaporan. Perbandingan anggaran dan pelaksanaan anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan yang disepakati antara legislatif dan eksekutif tercapai sesuai dengan undang-undang yang ada. Ini menjadi acuan penting dalam suatu pemerintahan (Makka *et al.*, 2015).

Tabel 1. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2016	889.342.884.605,10	799.459.099.837,00	89,89 %
2017	852.115.020.577,73	819.983.300.290,00	96,23 %
2018	1.057.034.876.340,77	987.421.191.731,85	93,41 %
2019	945.683.327.933,62	896.576.907.201,00	94,81%

Sumber : BKAD Kota Bitung, 2020.

Tabel 1 diatas mengenai Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Pemerintah Kota Bitung menyusun anggaran dengan memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselenggarakan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi yakni berhubungan dengan perealisasi alokasi anggaran yang tidak terealisasi dengan baik sesuai dengan penggunaan rencana alokasi anggaran yang telah di rencanakan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terealisasi sebesar 89,89%. Pada tahun 2017 belanja meningkat 6,34% dengan realisasi menjadi 96,23%. Pada tahun 2018 belanja menurun 2,8% dengan realisasi menjadi 93,41%. Pada tahun 2019 belanja mengalami peningkatan 1,4% dengan realisasi menjadi 94,81%.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja tahun 2016-2019 tidak mencapai 100%. Namun hal ini belum dapat menjelaskan apakah kinerja belanja menunjukkan hasil yang baik atau sebaliknya. Sehingga masalahnya adalah untuk menilai kinerja belanja dari BKAD Kota bitung maka perlu mengetahui bagaimana selisi penggunaan anggaran belanja dari periode 2016 – 2019, seberapa besar pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari periode 2016 - 2019, apakah penggunaan anggaran selama tahun anggaran telah efisien, Apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran secara optimal dalam memprioritaskan belanja. Untuk itu perlu adanya analisis lebih lanjut untuk mengetahui selisih penggunaan anggaran belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi penggunaan anggaran belanja dan pengoptimalan dalam memprioritaskan belanja pada BKAD Kota Bitung.

Dilihat dari informasi yang terdapat dalam laporan reallisasi anggaran kita dapat melakukan analisis anggaran, khususnya analisis belanja, antara lain berupa analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan juga rasio efisiensi belanja. Dilihat dari kinerja belanja, dapat dilihat kinerja APBD secara keseluruhan (Ratnasari & Munawaroh, 2019). Analisis varians adalah analisis variansi atau perbedaan antara pengeluaran dan yang dianggarkan. Jadi belanja tidak boleh melebihi anggaran yang ada. Dalam hal ini, pemerintah daerah dinilai memiliki kinerja belanja yang baik jika realisasi belanja tidak melebihi anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja untuk analisis varians, dapat dinyatakan sebagai nominal atau presentase. Jika terdapat Selisih anggaran dan belanja yang cukup signifikan dapat diprediksi ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi, pertama menunjukkan penghematan anggaran. Kedua, sebaliknya jika selisihnya lebih kecil, kemungkinan telah terjadi kelemahan ketika merencanakan penganggaran yang menyebabkan perkiraan pengeluaran tidak akurat atau anggaran tidak terserap sepenuhnya yang dapat terjadi karena ada program dan kegiatan yang tidak sesuai yg dilakukan oleh instansi meskipun sudah ada dalam anggaran (Mahmudi, 2010).

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu tahap ke tahap berikutnya ada positif atau negatif, dalam arti telah efektif atau tidak terserapnya penggunaan anggaran tingkat lembaga yang mendanai semua kegiatan lembaga (Halim, 2013). Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk menentukan tingkat pertumbuhan setiap item pengeluaran, apakah pertumbuhan itu wajar dan dapat dibuktikan. Pertumbuhan harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, jika tidak dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2010).

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Ada dua perhitungan dalam rasio keseraian ini, yaitu: rasio belanja operasional dan rasio belanja modal (Halim, 2007). Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dipakai dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Rasio Belanja Modal merupakan

perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin (Mahmudi, 2010).

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih tinggi menunjukkan telah terjadi pemborosan belanja yang sudah dianggarkan. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah. Secara umum nilai efisiensi diklasifikasikan dengan pembagian sebagai berikut ; a. Sangat efisien : <60%; b. Efisien : 60%-80%; c. Cukup efisien : 81%-90% d. Kurang efisien : 91%-100%; e. Tidak efisien : >100% (Mahmudi, 2010). Tujuan penelitian adalah; Untuk mengetahui selisi antara anggaran belanja dan realisasi belanja; Untuk mengetahui pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode anggaran 2016 – 2019; Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang sudah atau telah digunakan selama tahun periode anggaran; Untuk mengetahui keseimbangan penggunaan anggaran dalam memprioritaskan belanja.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif karena penelitian menganalisa kinerja belanja pemerintah kota bitung yang diteliti di badan keuangan dan aset daerah kota bitung dalam laporan realisasi anggaran. Metode ini mempunyai tujuan untuk mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang bisa menggambarkan tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari, mengolah dan menganalisa untuk menarik kesimpulan. Data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut ; Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung masalah yang diteliti untuk membandingkan informasi yang diperoleh dengan kenyataan. Pengamatan yang dilakukan yaitu dengan mengamati setiap kegiatan yang terjadi pada objek penelitian terutama dibagian keuangan dan akuntansi; Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui Tanya jawab dengan pihak yang berwenang mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan kepala bidang akuntansi dan kepala sub bagian monitoring dan evaluasi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung mengenai laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016-2019; Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada objek penelitian. Adapun dokumen yang diperoleh yaitu data primer berupa laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016-2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Menurut (Mahmudi, 2010) Cara agar dapat mengetahui analisis kinerja anggaran belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut :

Analisis varians adalah analisis variansi atau perbedaan antara pengeluaran dan yang dianggarkan untuk mengetahui penggunaan belanja. Dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja} \tag{1}$$

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}^t = 1 + \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}^t - \text{Realisasi Belanja Tahun}^{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Tahun}^{t-1}} \tag{2}$$

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Yang dihitung dalam analisis ini adalah rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasi dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\% \tag{3}$$



Rasio belanja modal dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio belanja modal terhadap tota belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\% \quad (5)$$

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Varians Belanja

Analisis varians adalah analisis variansi atau perbedaan antara pengeluaran dan yang dianggarkan untuk mengetahui penggunaan belanja. Berikut hasil penelitian analisis varians belanja.

Tabel 2. Analisis Varians Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	Perbandingan (%)
2016	889.342.884.605,10	799.459.099.837,00	89.883.784.768,10	89,89 %
2017	852.115.020.577,73	819.983.300.290,00	32.131.720.287,73	96,23 %
2018	1.057.034.876.340,77	987.421.191.731,85	69.613.684.608,92	93,41 %
2019	945.683.327.933,62	896.576.907.201,00	49.106.420.732,62	94,81%

*Data hasil olahan, 2021*

Di tahun 2016 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel Varians Belanja terlihat bahwa aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota bitung tidak semua digunakan pada pembiayaan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga ada sekitar 10,11% yang tersisih dari perbandingan dalam realisasi anggaran yang ada pada instansi. Di tahun 2017 ada sekitar 3,77% yang tersisih dari perbandingan dalam realisasi anggaran dilihat dari tabel varians belanja pada instansi. Dalam hal efisiensi telah terjadi penurunan sekitar 6,34% dilihat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 ada sekitar 6,59% yang tersisih dari perbandingan dalam realisasi anggaran dilihat dari tabel varians belanja pada instansi. sehingga jika melihat efisiensinya terjadi kenaikan sekitar 2,82% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019 ada sekitar 5,19% yang tersisih dari perbandingan dalam realisasi anggaran dilihat dari tabel varians beanja pada instansi. Jika melihat efisiensinya dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sekitar 1,4% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari perubahan tahun ke tahun dapat dikatakan efisien dikarenakan belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah dalam hal ini belanja dari pemerintah kota bitung tidak mencapai batas maksimum, tetapi dari segi keuangan penggunaannya lebih sedikit untuk memenuhi kebutuhan keuangan pada pembiayaan kegiatan oleh instansi. Yang dilakukan oleh instansi ini jika dilihat dari penggunaan keuangan masih belum memuaskan karena anggaran tidak digunakan sepenuhnya oleh pemerintah, namun pada dasarnya kinerja dari instansi ini bisa di bilang baik karena adanya penghematan dalam hal penggunaan keuangan. Secara umum perencanaan anggaran memiliki kelemahan, sehingga sangat mungkin menyimpang secara signifikan dari anggaran yang ada, diperkirakan program dari instansi belum optimal atau mungkin penggunaannya masih kurang tepat. Namun bisa dibbilang instansi sudah mencapai efisiensi karena dilihat dari penyerapan anggaran sudah baik. Pada prinsipnya semua item yang tersisih dapat dialihkan ke item belanja lainya yang akan atau masih diperlukan. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai buruk jika yang telah direalisasikan belanjanya lebih besar dari anggaran. Oleh karena itu pemerintah mengoptimalkan kinerja instansi sehingga bisa dilihat baik dalam penggunaan anggaran yang ada. Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Lantowa & Machmud, 2020) dan (Fatmahwati, 2021) yang menggunakan analisis varians belanja yang dimana daerah telah melakukan efisiensi dengan

belanja yang tidak melebihi anggaran.

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Berikut hasil penelitian analisis pertumbuhan belanja :

Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Realisasi belanja tahun t-1	799.459.099.837,00	891.983.300.290,00	987.421.191.731,85
Realisasi belanja tahun t	891.983.300.290,00	987.421.191.731,85	896.576.907.201,00
Kenaikan/penurunan	Positif 92.524.200.453 11.57%	Positif 95.437.891.441,85 20.70%	Negatif 90.844.284.530,85 9.20%

Data hasil olahan, 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi pertumbuhan positif pada anggaran belanja dari tahun 2016 sampai 2017. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan anggaran belanja pada tahun itu adalah Rp. 92.524.200.453 atau sebesar 11,57% . Pada tahun 2017 sampai 2018 diihat dari presentasi terjadi kenaikan menjadi 20,70% dimana pertumbuhannya adalah positif sebesar Rp. 95.437.891.441. Ditahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan dari segi presentase menjadi 9,20%, sehingga pertumbuhan anggaran belanjanya adalah negatif sebesar Rp. 90.844.284.530. Dapat diihat bahwa BKAD Kota bitung masih kurang dalam memanfaatkan belanja secara efisien.

Setelah dilakukan analisis pertumbuhan belanja yang dapat mengukur bagaimana kinerja atau kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja, maka dapat diketahui bahwa BKAD Kota Bitung dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan pada tahun 2016/2017 dapat meningkatkan pertumbuhannya sebesar Rp 92,524,200,453 atau 11,57%. Di tahun 2017/2018 terjadi juga kenaikan pertumbuhan sebesar Rp 95,437,891,441 atau 20,70% sehingga pada tahun ini pemerintah berhasil mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan. Di tahun 2018/2019 pemerintah masih belum mempertahankan pertumbuhan daerahnya sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 90,844,284,530 terjadinya kenaikan dan penurunan pertumbuhan belanja disebabkan oleh penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputra *et al.*, 2019) dan (Meyasha *et al.*, 2020) yang menggunakan analisis pertumbuhan belanja dimana pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa daerah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah daerahnya.

#### Analisis keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja menggambarkan bagaimana keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Hasil ini dapat dalam bentuk nominal atau presentase. Berikut hasil penelitian dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang menggambarkan rasio belanja operasi dan belanja modal :

Tabel 4. Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal

Tahun	Total belanja	Belanja operasi	Belanja modal	Presentase rasio	
				Belanja operasi	Belanja modal
2016	799.459.099.837,00	576.326.853.942,00	222.967.119.701,00	72,08%	27,92%
2017	819.983.300.290,00	616.810.148.673,00	200.434.060.632,00	75,22%	24,78%
2018	987.421.191.731,85	684.012.152.266,00	302.908.372.352,85	69,27%	30,73%
2019	896.576.907.201,00	671.616.561.878,00	222.697.263.274,00	74,90%	25,10%

Data hasil olahan, 2021

Tabel diatas terlihat bahwa di tahun 2016 sampai dengan 2019 instansi menggunakan anggaran lebih banyak pada belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang digunakan habis pakai atau yang jangka pendek sedangkan belanja modal merupakan belanja yang penggunaannya jangka panjang. Setelah dilakukan analisis tingkat belanja operasi lebih tinggi dari belanja modal, persentasenya ada di sekitar 60-90%. Hal ini membuat anggaran pada belanja modal lebih rendah dari pada belanja operasi. Instansi lebih menggunakan anggarannya pada pelayanan publik, gaji pegawai, pelayanan administrasi, bantuan sosial dan lain lain. Sedangkan untuk belanja modal yang digunakan untuk infrastruktur, irigasi dan lain lain masih kurang, hal ini dibuktikan dengan perbandingan antara belanja modal dan belanja operasi yang hampir melebihi batas yang ada. Dilihat dari hasil analisis keserasian belanja, maka alokasi untuk belanja operasi dan belanja modal dapat dilihat sebagai berikut, belanja operasi pada tahun 2016 mencapai 72,08% atau Rp 576,362,853,942 pada tahun 2017 mencapai 75,22% atau Rp. 616,810,148,673 pada tahun 2018 mencapai 69,27% atau 684.012.152.266 dan pada 2019 mencapai 74,90% atau Rp.671,616,561,878.

Jika melihat hasil penelitian diketahui bahwa instansi lebih menggunakan anggarannya pada belanja operasi, sehingga untuk belanja modal kurang. Ini membuat kinerja belanja dari instansi kurang baik karena dana belanja operasi sudah melewati proporsi belanja yang ada yakni 60-90% dari anggaran yang dibelanjakan. Instansi lebih menggunakan anggarannya pada pelayanan publik, gaji pegawai, pelayanan administrasi, bantuan sosial dan lain lain. Sedangkan untuk belanja modal yang digunakan untuk infrastruktur, irigasi dan lain lain masih kurang, hal ini dibuktikan dengan perbandingan antara belanja modal dan belanja operasi yang hampir melebihi batas yang ada. Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Palilingan *et al.*, 2015) dan (Hasanah *et al.*, 2018) dimana penelitian dengan menggunakan analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal yang menyebabkan instansi lebih memprioritaskan pada belanja operasi dari pada belanja modal.

#### Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Berikut hasil penelitian menggunakan rasio efisiensi belanja :

Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)
2016	889.342.884.605,10	799.459.099.837,00	89,89 %
2017	852.115.020.577,73	819.983.300.290,00	96,23 %
2018	1.057.034.876.340,77	987.421.191.731,85	93,41 %
2019	945.683.327.933,62	896.576.907.201,00	94,81%

*Data hasil olahan, 2021*

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2016 dari total anggaran yang ada, realisasi anggaran pada instansi sekitar Rp 799.459.099.837 dilihat dari presentase berada pada 89,89 %. Di tahun 2017 dari total anggaran yang ada, realisasi anggaran pada instansi sekitar Rp 819.983.300.290 dilihat dari presentase berada pada 96,23 %. Sehingga ada kenaikan tingkat efisiensi pada tahun itu. Di tahun 2018 dari total anggaran yang ada, realisasi anggaran pada instansi sekitar Rp 987.421.191.731, dilihat dari presentase berada pada 93,41 %. Di tahun ini, tingkat efisiensi menurun. Di tahun 2019 dari total anggaran yang ada, realisasi anggaran pada instansi sekitar Rp 896.576.907.201, dilihat dari presentase berada pada 94,81% Di tahun ini, ada peningkatan tingkat efisiensi.

Berdasarkan kriteria yang ada pada rasio efisiensi belanja menunjukkan instansi masih kurang efisien dilihat dari nilai rata – rata rasio efisiensi. Pada tahun 2016 nilainya adalah 89,89% ini masih tergolong cukup efisien. Di tahun 2017 berdasarkan kriteria tingkat efisiennya tidak baik karena mencapai 96,23% sehingga sesuai kriteria yang ada tergolong kurang efisien dari tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi di tahun 2018 yang dimana masih kurang efisien dari tahun sebelumnya karena tingkat efisiensinya berada di 93,41%. Di tahun 2019 terjadi peningkatan

tingkat efisiensi dari tahun sebelumnya yang dimana berdasarkan presentase berada di angka 94,81% namun masih tergolong kurang efisien dalam penghematan belanja yang dianggarkan. Dilihat dari tahun 2016 – 2019 rata – rata rasionya sebesar 93,58%, sehingga dapat disimpulkan instansi masih kurang efisien atau adanya kelemahan dalam menghemat anggaran belanja. Ketepatan dalam penggunaan anggaran pada program yang sangat menentukan tingkat efisiensi. Hal ini terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani *et al.*, 2018) dan (Tuberta *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa belanja dapat dikatakan efisien jika rasio efisiensinya tidak melebihi 90%.

### **Kesimpulan dan Saran**

Selisih anggaran belanja dan realisasi belanja daerah pada tahun 2016 - 2019 menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam perencanaan pada BKAD Kota Bitung; Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada instansi BKAD Kota Bitung berdasarkan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami perubahan; Hasil perhitungan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang cukup efisien; Berdasarkan perhitungan analisis keserasian belanja BKAD Kota Bitung dalam menggunakan anggaran masih kurang memprioritaskan anggarannya pada belanja modal sehingga untuk belanja operasi lebih besar daripada belanja modal; Dari pengukuran rasio efisiensi belanja dapat dilihat instansi masih kurang efisien karena jika dilihat dari kriteria yang ada masih belum memenuhi syarat efisien.

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran yang perlu diperhatikan agar dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan berikut ini : Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meninjau dengan teliti serta sekiranya dapat melakukan observasi terlebih dahulu seperti yang penulis lakukan, juga dapat lebih teliti serta merincikan dengan jelas hasil penelitian, dan juga dalam melakukan penelitian sekiranya dapat membandingkan dengan penelitian yang serupa agar dapat gambaran yang jelas terkait kualitas penggunaan anggaran belanja yang ada serta dapat meneliti secara khusus anggaran-anggaran yang telah terealisasi telah terealisasi sesuai dengan kualitas yang direncanakan atau belum, hal ini bisa dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan juga bisa melihat kondisi lapangan secara langsung. Bagi BKAD kota bitung dilihat dari pertumbuhan belanja pada tahun tersebut untuk hasilnya bisa dijadikan acuan kedepan dalam penganggaran sehingga pada tahun berikutnya dapat lebih baik lagi. Hal ini dapat dilihat dari presentase hasil perhitungan. Bagi BKAD agar lebih meningkatkan efisiensi oprasionalnya dalam pengelolaan anggaran daerah pada khususnya dan APBD pada umumnya. Dengan kinerja yang baik, efisiensi, produktivitas dan efektivitas biaya juga akan meningkat. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran untuk mencapai optimalisasi yang diinginkan segera selaras dengan visi misi BKAD Kota Bitung. Dari sisi efisiensi belanja BKAD Kota Bitung lebih stabil dengan meningkatkan pertumbuhan anggaran yang optimal dari tahun ini. Juga saran untuk BKAD kota bitung agar dapat lebih transparan dengan menganalisis setiap anggaran yang ada. Dan sekiranya juga melihat hasil penelitian yang dimana belanja operasi melebihi belanja modal kiranya BKAD kota bitung dapat mengalokasikan anggarannya juga ke belanja modal agar tidak terlalu banyak perbandingannya. Karena pembangunan infrastruktur juga sangat penting selain pelayanan publik atau gaji pegawai.



**Daftar Pustaka**

- Apriyanti, fika widya, Tiara, S., & Dewi, ratna sari. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai. 1289–1298.
- Fajriyah, M. (2018). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018.
- Fatmahwati, S. (2021). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Bppkad Kota Surakarta (2018 – 2020 ).
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah (ed. 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (ed. empat). Jakarta, Salemba Empat.
- Hasanah, N., Vidiyastutik, E. D., Ekonomi, F., Panca, U., & Probolinggo, M. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. 6(September), 26–35.
- Lantowa, F. D., & Machmud, J. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPM-PDT) Provinsi Gorontalo. 9(1), 33–43.
- Liando, G. Y., Elim, I., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 4(1), 1473–1484.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (ed. 2). Yogyakarta: UPP YKPN.
- Makka, A., Saerang, D. P. E., Elim, I., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Kotamobagu. 15(04), 324–333.
- Meyasha, I., Fhatimah, P., Christian, E., Akuntansi, P. S., & Cirebon, S. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon. 15, 9–16.
- Mulyani, siti urip, Utami, erni unggul sedya, & Ardhiansyah, N. (2018). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Kantor Kecamatan Kramat. 1–5.
- Nauly, tri marlina. (2019). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat Dpr Provinsi Sumatera Utara.
- Palilingan, A. F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. 3(1), 17–25.
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. 2(4), 49–58.
- Saputra, E., Latif, I. N., & Haryadi, R. M. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. 1–11.
- Sartika, D. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Tuberta, D., Zebua, S., Manaroinsong, J., & Moroki, F. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Rutin Badan Kabupaten Minahasa. 3(1), 1–10.
- Wiranda, dara gendis. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang Periode 2016-2020.